

Submisi kepada Pelapor Khusus mengenai Hak Atas Pangan

Kelompok Kerja Papua untuk Perempuan (PWG)

Kelompok Kerja Papua untuk Perempuan (PWG)¹ melakukan penelitian aksi partisipatif selama empat tahun (2013-2017) dengan melibatkan secara total 170 perempuan asli Papua. Penelitian ini adalah penyelidikan kualitatif yang menggunakan alat-alat penelitian partisipatif untuk mendokumentasi pengalaman dan suara perempuan Papua yang jarang terdengar. Penelitian ini berfokus pada kekerasan terhadap perempuan, tapi juga mencakup sebuah pendekatan yang lebih meluas untuk menangkap isu-isu kunci yang disuarakan oleh perempuan. Kami menciptakan sebuah proses untuk “mendengarkan” suara perempuan yang secara spontan menceritakan pengalaman hidup mereka. Laporan naratif dan video sudah dihasilkan dari proses ini.² Penelitian ini berfokus pada hak-hak sipil politik serta sosial, ekonomi, dan budaya perempuan Papua. Ada temuan-temuan kunci mengenai kekerasan terhadap perempuan serta trauma dan diskriminasi. Namun begitu, isu kunci yang juga diangkat adalah mengenai **hilangnya sumber-sumber penghidupan dan ketahanan pangan** bagi perempuan Papua.

Bagi masyarakat asli Papua, tanah dan hutan memiliki ikatan yang kuat dengan kehidupan mereka, tak hanya menjadi sumber makanan, tapi juga memberi makna bagi kehidupan mereka. Ketika hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan maupun fungsi-fungsi produktif lain, perempuan harus menyesuaikan makanan mereka karena akses mereka kepada sumber-sumber tradisional menjadi hilang. Di beberapa kasus, terjadi ketergantungan baru terhadap makanan “instan”.

“Hutan tempat kita makan, tapi setelah dibongkar sudah agak susah. Mungkin kayu masih bisa kita dapat, tapi kalau buruan sudah tidak bisa. Padahal dulu kita punya orang tua dong bilang kasuari sama babi masih bisa dekat, sekarang sudah tidak lagi.” Perempuan asli Papua dari Keerom.

Satu desa bernama Kampung Ivima-had di Merauke memiliki fungsi penting dalam ritual adat suku Marind. Namun, ketika wilayah ini dialihfungsikan menjadi persawahan dan pemukiman bagi para migran, suku Marind tidak bisa lagi mengakses sebuah wilayah keramat karena perumahan-perumahan baru sudah didirikan di sana.

Perempuan memainkan peran kunci dalam menjaga hutan dan kebun, namun secara adat, hak-hak mereka atas sumber-sumber daya alam ini tidak diakui. Pada saat yang sama, kewajiban untuk menghasilkan makanan ada di pundak mereka. Para perempuan di Merauke berkata:

“Perempuan yang sekarang kerjakan semua pekerjaan dalam rumah maupun di luar rumah, seperti pergi ke hutan, pangkur sagu, pikul kayu dari hutan, semuanya dikerjakan sendiri. Dulu suami yang olah tanah, tapi su dijual suami, tidak ada lagi.”

“Tempat cari makan sekarang menjadi sawah milik orang lain. Dulu kitong cari makan hanya di sekitar wilayah kampung, sekarang harus jalan jauh dengan jarak tempuh yang tidak singkat. Pergi pagi bahkan pulang sore atau malam di tempat cari makan, tidak seperti dulu, hanya pergi sebentar tapi sudah dapatkan hasil, sehingga bisa pulang dan melakukan aktivitas lain pada hari yang sama.”

Perubahan pola konsumsi mereka juga berdampak pada kesehatan perempuan. Perempuan di Kampung Ivima-had mengatakan bahwa mereka merasa tidak cocok ketika mengonsumsi

¹ Anggota PWG mencakup SKP Keuskupan Merauke/EI-Addper, Merauke; KPKC GKI, Jayapura; ELSHAM Papua, Jayapura; Humi Inane, Wamena; Belantara Papua, Sorong; Asia Justice and Rights. Indonesia sudah membentuk dua provinsi administratif untuk mengatur wilayah ini, yaitu provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Submisi ini menggunakan istilah “Papua” untuk mengacu ke kedua wilayah ini.

² Laporan lengkap dalam bahasa Indonesia “Sa Ada Di Sini: Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan yang Tak Kunjung Usai” bisa diunduh dari <http://asia-ajar.org/2017/11/sa-ada-di-sini-participatory-action-research-report/> dan videonya (dengan teks bahasa Inggris) bisa dilihat di <https://www.youtube.com/watch?v=5HHE5lfuNOA>

sayuran yang ditanam oleh transmigran karena menggunakan pupuk kimia. Sekalipun begitu, banyak perempuan asli yang berhenti menanam kebun mereka dan menjadi tergantung pada makanan yang dihasilkan oleh para transmigran. Sebagaimana yang disebutkan oleh para perempuan di Merauke:

“Sakit kaki karena makan sayur yang pake pupuk, kalau makan sayur tanam sendiri tidak. Tanam tidak rutin karena banyak pekerjaan yang dikerjakan.”

“Dulu makan sagu dan daun ubi yang kita tanam sendiri. Kalau makan sayur beli lebih parah karena mereka pakai pupuk. Sekarang makan nasi saja karena sagu juga kurang.”

Perempuan di Maibo, Sorong, ingat ketika sebuah perusahaan penebangan kayu bernama PT Intim Pura pada tahun 1989 mengambil alih lahan yang dimiliki suku Klaibin dan Moibi. Kedua suku ini terpaksa pindah ke desa Maibo. Perusahaan ini mendatangkan pekerja-pekerja dari luar Papua sehingga meningkatkan jumlah populasi yang ada di wilayah itu. Perusahaan ini berhenti beroperasi pada tahun 2010, tetapi telah mengakibatkan pencemaran atas sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat setempat.

“Air sudah kabur, dan kotor karena pohon tumbang jatuh di kali, dan waktu banjir, air jadi kotor. Air dulu tuh dalam, sekarang air dangkal kita bisa sebrang dari sebelah ke sebelah.”
Perempuan asli Papua dari Sorong.

Tak hanya mencemari sungai, perusahaan itu juga menciptakan ketergantungan baru terhadap bibit dan pupuk kimia. Sebelum perusahaan itu datang, masyarakat setempat berburu dan mengumpulkan makanan di hutan, sambil bercocok tanam di kebun kecil mereka yang ada di desa. Ketika perusahaan itu mengambil alih lahan mereka, perusahaan itu juga membuat kebun-kebun desa dengan memakai bibit dan pestisida impor. Ketika perusahaan itu pergi, masyarakat tak lagi tahu bagaimana cara berkebun. Pestisida juga mengurangi jumlah ikan.

“Su trada makan ikan lagi karena ikan yang dulu banyak kali nih masyarakat asli pake pestisida.” Perempuan asli Papua dari Sorong

Hutan yang sebelumnya digunakan perusahaan itu menjadi lahan tidur yang tandus dan tidak ada program penghijauan kembali. Para perempuan berbicara tentang kesulitan yang harus mereka hadapi, yaitu berjalan sejauh tiga kilometer untuk mencapai kebun mereka dan untuk mencari makanan. Para perempuan yang terlibat di penelitian kami di Sorong menyatakan bahwa:

“Sekarang kitong (kita) tuh kalau mau berkebun sudah jauh... mama tanam kasbi, keladi, pisang... ada juga musiman kalau mau biyai adik-adik sekolah mama tanam kacang panjang.”

“Sekarang karena tokok sagu jauh, kadang kalau mau makan papeda tuh kitong beli saja di pasar.”

Penebangan hutan juga menyebabkan hilangnya bahan baku untuk membuat tas tradisional Papua, *toware*. Banyak perempuan di Sota, Merauke, yang tidak lagi membuat *toware* sendiri. Mereka lebih banyak membelinya dari perempuan dari PNG, dimana bahan bakunya masih banyak tersedia. Para perempuan di Merauke berefleksi:

“Dulu sebelum kampung dibuka, hutan masih banyak, tali untuk bikin toware juga masih banyak. Sekarang kalau mau harus jalan jauh ke hutan di arah Muting sana... tempat cari buah merah dan sarang semut, harus jalan jauh ke hutan PNG.”

“Kami di sini kalau sakit pakai obat-obatan alam, walaupun saat ini harus mencari di hutan yang jaraknya cukup jauh, tidak lagi seperti dulu yang hanya ambil di pinggir-pinggir kampung.”

Temuan kunci: Ketidakpastian kepemilikan sumber daya alam dan tanah ulayat

menghambat penguatan perempuan Papua dan membuat perempuan asli Papua menjadi rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi yang berulang. Sebuah masalah mendesak diangkat oleh perempuan Papua dalam penelitian ini adalah hak dan akses mereka kepada sumber daya alam. Secara konsisten, perempuan menyuarakan hilangnya sumber-sumber daya alam yang ada di semua wilayah penelitian kami.

Dari 170 perempuan yang terlibat dalam penelitian ini, 85 orang mengalami kehilangan tanah, kebun, atau hutan akibat relokasi karena kebijakan pemerintah atau sebagai dampak dari konflik kekerasan. Kehilangan sumber-sumber alam memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan mereka.

Rekomendasi-rekomendasi kunci:

Proses penelitian partisipatoris kami menegaskan empat elemen kritis yang harus hadir untuk memperkuat keberlangsungan dan pemulihan perempuan asli Papua, termasuk korban kekerasan, guna memastikan bahwa mereka, keluarga mereka, dan komunitas mereka bisa menjadi agen-agen perubahan, mendorong hidup yang bebas dari kekerasan. Perlu ada upaya serius untuk memperkuat landasan kehidupan perempuan secara berkesinambungan. Ini termasuk dengan memperhatikan sumber kehidupan mereka seperti akses dan penguasaan atas tanah, kebun, hutan dan air; rumah yang layak dan akses pada pelayanan kesehatan, apabila diperlukan.

Advokasi bagi Perlindungan Sumber-sumber Daya Alam dan Pengetahuan Tradisional

- ⇒ Mengalokasikan lahan dan memberikan sertifikat kepemilikan lahan kepada perempuan yang telah bermukim secara permanen di distrik-distrik baru untuk memungkinkan mereka untuk mendapatkan bantuan, membangun rumah, dan mengembangkan penghidupan mereka.
- ⇒ Mendukung sebuah inisiatif mengenai hak masyarakat asli Papua atas tanah, termasuk sebuah pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan tanah, pemetaan masalah, dan bagaimana dampak perubahan penggunaan lahan terhadap perempuan.
- ⇒ Memperkuat akses perempuan kepada dan kontrol mereka atas kebun mereka dengan melakukan advokasi tentang hak perempuan atas kepemilikan lahan. Mendukung program-program yang menyediakan lahan untuk berkebun/tanah bagi perempuan asli Papua. Mempromosikan pembelajaran bagi para perempuan asli Papua melalui pertukaran dan studi dengan kelompok masyarakat asli lain mengenai isu-isu tentang hak perempuan asli atas tanah.
- ⇒ Mengadvokasi perlindungan hak-hak masyarakat Papua dan penggunaan sumber-sumber daya alam yang berkelanjutan.
- ⇒ Mempromosikan dan mendukung pengetahuan yang meningkat mengenai tanaman lokal untuk makanan, obat-obatan, dan produk-produk lain.
- ⇒ Mengeksplorasi sumber-sumber energi yang cocok dan bersifat alternatif dan inisiatif-inisiatif lain, seperti kompor memasak yang menggunakan bahan bakar yang efisien, lampu solar, dan penyaring air.

Bekerja dengan Sistem Adat dan Tokoh-tokoh Adat

- ⇒ Bekerja dengan para pemimpin budaya adat untuk meninjau sistem dan struktur sehingga mereka melibatkan perempuan sebagai pemangku kebijakan dan pengambil keputusan kunci.
- ⇒ Memperkuat ketahanan dan kekuatan perempuan di dalam struktur adat.

Meninjau Kebijakan-kebijakan Diskriminatif dan Memastikan Perlindungan Hukum bagi Perempuan

- ⇒ Mendukung sebuah tinjauan legislasi formal di wilayah-wilayah yang mempengaruhi hak-hak perempuan asli Papua seperti akses kepada tanah, harta benda, dan warisan. Perhatian khusus harus diberikan kepada perempuan kepala keluarga, janda, dan orang tua tunggal.
- ⇒ Mengadvokasi pembentukan dan pelaksanaan peraturan daerah yang melindungi hak-hak perempuan asli Papua.